



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 153 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN IBUN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 56 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 148 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 52);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan

- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 03 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 03 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 153

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
BANDUNG
NOMOR 153 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN IBUN KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN IBUN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

Pemerintah
Kabupaten Bandung



BUPATI BANDUNG PERATURAN



PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025



KECAMATAN IBUN
KABUPATEN BANDUNG

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ibun Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Dengan semangat BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera) Tim Penyusun Renja Kecamatan Ibun telah merumuskan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran (IKU), Strategi dan Kebijakan yang tujuannya sebagai kaidah dan pedoman unit Kerja di kecamatan Ibun guna memberikan kontribusi terhadap **Visi Kabupaten Bandung Tahun 2025 “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten bandung Yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera”** dan mensukseskan Misi Nomor 4 **“Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui Birokrasi yang profesional, dan Tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai – nilai keagamaan”**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ibun adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi dalam melaksanakan tugasnya, guna menentukan prioritas – prioritas dibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2025 dapat dicapai.

Harapan kami semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ibun Tahun 2025 dapat bermanfaat, bukan saja untuk kecamatan Ibun akan tetapi untuk semua pihak yang berkepentingan terhadap Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah di Kabupaten bandung.

CAMAT IBUN



AGUS RUSTANDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I1

PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang1

1.2 Landasan Hukum2

1.3 Maksud dan Tujuan.....4

BAB II8

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra8

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Ibun Tahun 2023.....9

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....18

BAB III.....46

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....46

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional46

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....48

3.3 Program dan Kegiatan62

BAB IV80

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH80

BAB V97

PENUTUP.....97

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target, Realisasi, Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun 2023.....	7
Tabel 2.2	Hasil Pengukuran Atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ibun Tahun 2023 dan Perbandingan Capaian Antara Tahun 2022 dan Tahun 2023	8
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung	9
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung	18
Tabel 2.5	Kriteria Penialian Capaian nilai AKIP.....	20
Tabel 2.6	Target dan Realisasi Kinerja Persentase BMD/Aset dalam Kondisi baik tahun 2023	20
Tabel 2.7	Jenis Layanan Pada Kecamatan Ibun	21
Tabel 2.8	Pegawai Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin	23
Tabel 2.9	Pegawai Kecamatan Berdasarkan Golongan	23
Tabel 2.10	Data PNS Berdasarkan Pendidikan.....	23
Tabel 2.11	Data PNS Kecamatan Ibun yang telah mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan bersarkan Esselon Tahun 2023	23
Tabel 2.12	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung Tahun 2025	26
Tabel 2.13	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung	52
Tabel 3.1	Dukungan Program-Program Perangkat Daerah (Kecamatan) yang mendukung terhadap prioritas pembangunan kabupaten, provinsi dan prioritas nasional.....	53
Tabel 3.2	Sasaran	55
Tabel 3.3	TC. 29. Tujuan dan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rancangan Awal Renja Tahun 2025	56
Tabel 3.4	TC-33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju 2026 Kecamatan Ibu Kabupaten Bandung	63
Tabel 4.1	Rencana Kerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun Anggaran 2025	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun berjalan sebagai acuan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Ibum mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2024.

Rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 menjadi acuan perumusan program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renja Kecamatan Ibum, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Kecamatan Ibum menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas rancangan awal RKPD Tahun 2025, disusun ke dalam rancangan awal Renja Kecamatan Ibum Tahun 2025, selaras dengan Renstra Kecamatan Ibum Tahun 2021-2026. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sub kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Kecamatan Ibum berdasarkan pelaksanaan Renja Kecamatan Ibum tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Renja Perubahan Kecamatan Ibum dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ibum.

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Ibun Tahun 2025, dalam proses penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Bagian Ketujuh Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah, terdiri dari:

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.
3. Penyusunan Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Lapora Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutkahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9);
 23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1);
 24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 39);
 25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 124 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 124);
 26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 75);
 27. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.615-KSOTDA/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Bandung Kepada Camat.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Disusunnya Renja Perubahan Kecamatan Ibum Tahun 2025 maksud dan tujuan untuk:

1. Memberikan acuan bagi Kecamatan Ibum dalam menyusun program/kegiatan/subkegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
2. Memberikan acuan bagi Kecamatan Ibum dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
3. Memberikan acuan bagi Kecamatan Ibum dalam menyusun indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

4. Memberikan acuan bagi Kecamatan Ibun dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Ibun Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 sebagai bahan penyusunan Renja Kecamatan Ibun Tahun 2025;
2. Merumuskan rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ibun yang dilaksanakan pada tahun 2025;
3. Merancang acuan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Camat Ibun dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

1.2. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Ibun, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Ibun.

1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan tentang uraian pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Kecamatan Ibun serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan tentang penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program/kegiatan/sub kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program/kegiatan/sub kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi program dimaksudkan untuk melakukan telaah program terhadap setiap hasil yang telah direncanakan, dengan proses evaluasi ini perencanaan program akan lebih terarah sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditentukan. Kegiatan Evaluasi pelaksanaan Renja dan permasalahan-permasalahan yang belum selesai dituntaskan pada tahun sebelumnya serta isu-isu yang berkembang pada tahun sebelumnya merupakan basis data dalam merencanakan program dan kegiatan Renja. Keberhasilan proses perencanaan akan dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan kegiatan di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap target, realisasi, sasaran dan capaian kinerja tahun 2023 diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 94,63 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Target, Realisasi, Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
		(Rp.)	(Rp.)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.477.622.515,00	5.837.791.998,00	90,12%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	425.794.377,00	424.755.860,00	99,76%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	253.479.200,00	253.479.000,00	100,00%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42.482.800,00	42.482.400,00	100,00%
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	65.811.474,00	65.810.740,00	100,00%

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	120.530.000,00	119.629.120,00	99,25%
	JUMLAH	6.477.622.515,00	5.837.791.998,00	92,12%

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Ibun Tahun 2023

Tabel 2.2.
Hasil Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Ibun Tahun 2024 dan Perbandingan Capaian
Antara Tahun 2023 dan Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP)	74,80	74,85	75,71
		Presentase BMD/Aset Dalam Kondisi Baik	97,20%	76%	96%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,02	80	91,09
		Presentase Ketepatan Dalam Penyelesaian Pelayanan Kepada Masyarakat			
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Cdpot Berkembang	3	3	3

Dari tabel di atas dapat di simpulan bahwa sasaran pada Indikator utama yaitu meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan pada Kecamatan Ibun dalam setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dalam hal ini Kecamatan Ibun dapat membuktikan bahwa mampu BANGKIT mengerjar ketertinggalan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.3 - Tabel T-C. 29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Bandung

Kode Rekening						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 -2026 (Sebelum Pemetaan)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Sebelum Pemetaan)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023) (Sesudah Pemetaan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (Sebelum Pemetaan)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (Sebelum Pemetaan)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)						(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8 =7 / 6)	(9)	(10 = 5+7+9)	(11 = 10/4)
7	1	1	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	74 Poin		71 Poin	68,28 Poin	96%	72 Poin	74,80 Poin	103%	
						Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	85% Poin		70%	98,37%	140%	73%	95,77%	131,19 %	
7	1	1	2,01	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	1	1	2	1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6,00 Dokumen								

7	1	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6,00 Dokumen								
7	1	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6,00 Dokumen								
7	1	1	2	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,00 Dokumen								
7	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6,00 Dokumen								
7	1	1	2,0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang diselesaikan secara tepat waktu	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Laporan	4 Laporan	80%	
7	1	1	2,0 1	7	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokuemen								
7	1	1	2,0 1	8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data								
7	1	1	2,0 2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	1	2,0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%	

7	1	1	2,0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Dokumen		4 Dokuman	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	12 Dokumen	60%
7	1	1	2,0 2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	8 Dokumen	80%
7	1	1	2,0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
7	1	1	2,0 6	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	1	2,0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Jenis		6 Jenis	6 Jenis	100%	6 Jenis	18 Jenis	60%
7	1	1	2,0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	50 Jenis		10 Jenis	10 Jenis	100%	10 Jenis	30 Jenis	60%

7	1	1	2,0 6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	75 Jenis		15 Jenis	15 Jenis	100%	1 Paket	45 Jenis	60%
7	1	1	2,0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	6 Paket	60%
7	1	1	2,0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	0 Paket	12 Paket	40%
7	1	1	2,0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	0 Paket	2 Paket	40%
7	1	1	2,0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Peserta kunjungan tamu	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
7	1	1	2,0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
7	1	1	2,0 7	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD/Asset dalam kondisi baik	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	1	2,0 7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Jenis		5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	15 Jenis	80%
7	1	1	2,0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang dibeli	0		0	0	0	0	0	0

7	1	1	2,0 8	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	1	2,0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang tertata	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
7	1	1	2,0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
7	1	1	2,0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
7	1	1	2,0 9	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100%		70%	98,37%	140%	73%	90,45%	90,45%
7	1	1	2,0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit		5 Unit	5 Unit	100%	10 Unit	20 Unit	40%

7	1	1	2,0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	lah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		1 Unit	0 Unit	0	0 Unit	1 Unit	20%
7	1	2	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	89%		74 Poin	86,56 Poin	117%	77 Point	87,02	113%
7	1	2	2,1	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	2	2,1	2	Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	40%
7	1	2	2,2	0	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	2	2,2	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	40%

7	1	2	2,4	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	2	2,4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	9 Laporan	60%
7	1	3	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Capaian Program dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	3	2,0 1	0	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	3	2,0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasratak atan		2 Lembaga Kemasratak atan	2 Lembaga Kemasratak atan	100%	2 Lembaga Kemasratak atan	6 Lembaga Kemasyarak atan	80%
7	1	5	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	1	5	2,0 1	0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	5	2,0 1	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peringatan hari-hari bersejarah	15 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	0	10 Kegiatan	66%
7	1	5	2,0 1	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, , Regional, dan Nasional	125 Orang		25 Orang	25 Orang	100%	25 Orang	75 Orang	60%
7	1	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Beradministrasi Baik	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	6	2,0 1	0	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	1	6	2,0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan merupakan garda terdepan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan yang berkualitas dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat kecamatan, sehingga kecamatan dapat berkiprah untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada di kecamatan (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah di tingkat kecamatan, dan merupakan peluang yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan akan di laksanakan di tingkat kecamatan. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program/kegiatan/subkegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Ibun dalam periode 2021 – 2026. Kecamatan Ibun sebagai sebagai salah satu perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya yang berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi pemerintah kecamatan dan merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karena itu, capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Analisis Kinerja Pelayanan di Kecamatan Ibun merupakan hasil yang objektif sesuai dengan hasil pengukuran kinerja tahun sebelumnya sebagaimana tergambar pada tabel T-C.30 mengenai Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Ibun\

Tabel 2.4 - Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ibum
Kabupaten Bandung

N O	Indikator	SPM/standar nasional	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nilai AKIP (Point)			71	72	73	74	60,28	67,75	75,71	73	74	
2	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik (%)			70	73	76	79	100	98,37	96%	77	80	
3	Persentase Desa yang Administrasi nya telah Baik (%)			74	74	77	80	100	100	0	100	100	
4	Indek Kepuasan Masyarakat (Point)			74	74	77	80	80,26	86,56	91,09	87	87	

2.1 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Ibum berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Adapun rincian tugas pokok Kecamatan Ibum yaitu memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Ibum. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kecamatan Ibum dituntut untuk melaksanakan perencanaan kinerja yang efektif serta memastikan pencapaian tujuan Kecamatan Ibum melalui proses perencanaan serta monitoring dan evaluasi. Pada tabel T-C.30 telah dijelaskan pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah namun perlu digarisbawahi terdapat hal-hal kritis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang ditargetkan, yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas konerja birokrasi. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014

tentang SAKIP. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah maka perlu dilakukan suatu evaluasi atas implementasi SAKIP di Perangkat Daerahnya. Dalam rangka pelaksanaan SAKIP, Pemerintah Kabupaten Bandung telah melaksanakan evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Bandung. Pada tahun 2021 Inspektorat telah melakukan evaluasi atas SAKIP Pemerintah Kecamatan Ibum dengan tujuan:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tentang implementasi SAKIP;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi SAKIP tersebut menghasilkan output nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berikut ini adalah tabel kategori penilaian AKIP dimaksud:

Tabel 2.5.
Kriteria Penilaian Capaian Nilai AKIP

No	Kategori	Interval Nilai	Interpretasi
1	AA	91-100	Sangat Memuaskan
2	A	81-90	Memuaskan , memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	71-80	Sangat Baik , akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	61-70	Baik , akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	51-60	Cukup , memadai. Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taan kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	31-50	Kurang , sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang , sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja. Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Ibum Tahun 2024 nomor 700/333/Inspektorat tanggal 27 Juni 2024, Kecamatan Ibum memperoleh nilai tingkat akuntabilitas kinerja sebesar

75,71% Poin atau kategori **BB** dengan kriteria interpretasi “**Sangat Baik**”. Dengan nilai tersebut.

2. Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik

Barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yaitu meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Barang Milik Daerah (BMD) menjadi salah satu unsur penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dikelola dengan akuntabel, efektif, efisien, serta ekonomis.

Tabel 2.6.
Target dan Realisasi Kinerja
Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capain
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Persentase BMD/Aset Dalam Kondisi Baik	76%	96%	127%

Dari tabel di atas dapat di baca Kecamatan Ibum memiliki target sebesar 76% pada tahun Anggaran 2024, capaian berhasil terealisasi dengan baik dengan nilai realisasi sebesar 96%. Angka ini di dapat dari total aset Kecamatan Ibum menurut Neraca dari tahun 2024 sebesar Rp.6.969.261.766,- atau sebesar 4,00% dari total aset penyusutan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa persentase aset yang terpelihara adalah sebesar 96% dengan capaian mencapai 127% dari target yang di tetapkan.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Penilaian yang diberikan langsung oleh masyarakat diharapkan dapat menentukan ukuran kinerja pelayanan publik. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui pelayanan publik adalah dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan suatu organisasi publik adalah dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Ketentuan mengenai Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sendiri adalah pengukuran secara komperhensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung implementasi SKM dilakukan melalui sarana teknologi yang dapat mengakomodir pengisian survei secara *online*, yaitu aplikasi e-SKM. Jenis pelayanan dalam pelaksanaan SKM melalui e-SKM di Kecamatan Ibun pada tahun 2024 dilaksanakan dari tanggal 15 Februari 2023 s/d 28 November 2024 sebanyak 25 jenis layanan dengan jenis pelayanan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Tabel Rekap Jenis Layanan Pada Kecamatan Ibun

NO	JENIS PELAYANAN	POPULASI	RESPONDEN MINIMAL	NILAI MUTU	PERSENTASE %
1	Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga	1484	315	B	100 %
2	Fasilitasi Pembuatan e-KTP	998	285	A	100 %
3	Fasilitasi Pembuatan Kartu Identitas Anak	33	30	A	100 %
4	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran	205	135	B	100 %
5	Fasilitasi Pembuatan Akta Kematian	52	46	B	100 %
6	Fasilitasi Pembuatan Surat Pindah/Datang	584	237	B	100 %
7	Fasilitasi Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu	527	227	B	100 %
8	Pembuatan Surat Keterangan Lainnya	140	103	B	100 %
9	Pembuatan Akte Pertanahan	16	15	B	100 %
10	Fasilitasi Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris	67	57	B	100 %
11	Legalisir Dokumen	69	58	B	98.3 %
12	Rekomendasi dalam Pelaksanaan Pencairan Keuangan Desa	107	84	B	52.4 %
13	Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD dan SMP	5	4	-	0 %
14	Pencatatan dan Pendataan Koperasi dan UMKM	5	4	-	0 %
15	Rekomendasi Bantuan Dana / Hibah	5	4	-	0 %
16	Rekomendasi Kartu Kerja	5	4	-	0 %
17	Rekomendasi untuk izin Pengelolaan Sarang Burung walet, Lebah Madu, dan Budidaya Jamur	187	127	-	0 %
18	Rekomendasi Pemberian Penghargaan Kepada Seniman, Budayawan yang Telah Berjasa Kepada Negara dan Daerah	5	4	-	0 %
19	Fasilitas Penyelesaian Masalah Pertanahan	5	4	-	0 %

20	Rekomendasi Kepada Organisasi Sosial / Panti Sosial yang Berada di Desa / Kelurahan dalam Hal Pendaftaran Baru/ Ulang	5	4	-	0 %
21	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan, Desa dan Kelurahan	5	4	-	0 %
22	Rekomendasi Perangkat Desa	5	4	-	0 %
23	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Antar Kecamatan/ Desa dan Antara Kecamatan/ Desa dengan Swasta dalam Skala Kabupaten di Kecamatan	5	4	-	0 %
24	Rekomendasi Pembentukan Kelembagaan P3A(Perkumpulan Petani Pemakai Air)	5	4	-	0 %
25	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	4	-	0 %

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Ibum dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Ibum sebagaimana telah diatur dalam peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Fungsi Kecamatan yang sekaligus Menjadi Fungsi Camat yaitu:

1. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
3. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

5. Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Tenaga PNS yang ada telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan disisi lain karena kebutuhan mendesak dan perlu adanya saling bantu, maka dalam pekerjaannya secara insidentil saling membantu dan saling mengisi sehingga terjalin kebersamaan yang menguatkan soliditas diantara PNS,

Capaian kinerja di Kecamatan Ibun tidak terlepas pula dari adanya kontribusi tenaga non ASN yang rata – rata berusia muda dan mempunyai kemampuan dibidang IT dan mempunyai akselerasi sehingga keberadaannya dapat menunjang terhadap Kinerja Kecamatan Ibun, perpaduan Tenaga PNS dan Non ASN di Kecamatan Ibun menjadi kekuatan kinerja yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan guna mewujudkan Pemerintahan yang baik.

Tabel 2.8
Pegawai Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	ASN	Non ASN	Jumlah
1	Laki – laki	19	3	22
2	Perempuan	2	5	8
3	Jumlah	21	8	29

Tabel 2.9
Pegawai Kecamatan Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	Gol I	-	-	-
2.	Gol II	9	-	9
3.	Gol III	8	-	8
4.	Gol IV	3	-	3
	Jumlah	21	-	21

Berdasarkan Tabel 2.7. dan grafik di atas maka pegawai Kecamatan Ibun berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 0 % , Golongan II sebanyak 42%, Golongan III sebanyak 38.09% dan Golongan IV sebanyak 14.28%, melihat komposisi tersebut, pagawai Kecamatan Ibun dengan SDM tersebut cukup bisa untuk menjalankan roda organisasi yang lebih baik dan lebih maju.

Tabel 2.10
Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian		
		PNS	CPNS	TKK
1	SD	-	-	-
2	SMP	1	-	-
3	SMA	6	-	-
4	D3	2	-	-
5	S1	8	-	-
6	S2	4	-	-
	Jumlah	21	-	-

Dari tabel tersebut menunjukkan, Pegawai Kecamatan Ibun berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: SD Sebesar 0 % , SMP sebesar 4.76 % , SMA sebesar 28.57%, D3 sebesar 9.52%, berpendidikan S1

sebesar 38,29% dan berpendidikan S2 sebesar 19,04% Bila dilihat dari tingkat pendidikan , Kecamatan Ibum sebagai lembaga teknis daerah, dari segi kuantitas memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai di dalam membangun proses perencanaan dan mensinergikan program dan kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Di samping pendidikan formal, pegawai Kecamatan Ibum juga telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Data Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Ibum yang telah mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan Berdasarkan Esselon Tahun 2021

No.	Eselon	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklatpim	Ket
1.	III	2	Diklatpim III	
2.	IV	5	Diklatpim IV	
	Jumlah	7 orang		

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Ibum Bulan Juli 2023

6. Isu Penting Penyelenggaran Tugas Pokok

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat merupakan citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada umumnya. Perbaikan dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang seharusnya dilakukan.

Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Kecamatan Ibum merupakan wilayah yang perkembangannya cukup pesat, hal tersebut akan berdampak positif terhadap perkembangan usaha di Kecamatan Ibum. Sehingga akan menunjang terhadap PAD di kecamatan. Disisi lain dengan bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak terhadap rumah hunian warga yang terus bertambah, sehingga akan menjadi potensi di dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kecamatan

dari sektor Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Luas dibawah 250 m².

2.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 mengenai rumusan kebutuhan program/kegiatan/subkegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran pagu indikatif yang dibutuhkan.

Pada tahun anggaran 2025, review rancangan awal RKPD tahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan Renja Kecamatan Ibum Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.12 - T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2025 Kecamatan Ibun

NO	Rencana Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cata tan Penti ng
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Ibun	Nilai AKIP	76	Poin	4.310.771.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Ibun	Nilai AKIP	76	Poin		
1,1	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ibun	Tercapainya Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.	80	Persen	61.050.000,00	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ibun	Tercapainya Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.	100	Persen		
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	5.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				

1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Ibun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	36.050.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Ibun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
1.1.8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	2.000.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				
1.1.9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Ibun	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	2.000.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Ibun	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				
1,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Ibun	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	100	Persen	4.558.270.086,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Ibun	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu				
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Ibun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/Bulan	Orang/Bulan	4.554.270.086,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Ibun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	Dokumen	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				

1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Ibun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Ibun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Ibun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Ibun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
1.2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Ibun	persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	80	Persen	13.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Ibun	persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu				
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Ibun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	10.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Ibun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				
1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Ibun	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30	Orang	3.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Ibun	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				

1,3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Ibum	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	80	Persen	104.800.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Ibum	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor				
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Ibum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Ibum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Ibum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	41.300.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Ibum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
1.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Ibum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	20.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Ibum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Ibum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	500.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Ibum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Ibum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	Dokumen	2.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Ibum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				
1.3.6	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Ibum	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	Paket		Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Ibum	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				
1.3.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Ibum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	1.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Ibum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				

1.3.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Ibun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	35.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Ibun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
1,4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ibun	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	55.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ibun	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.4.1	Pengadaan Mebel	Kecamatan Ibun	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	55.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kecamatan Ibun	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				
1.4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Ibun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Ibun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				
1.4.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Ibun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Ibun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				
1,5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ibun	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	344.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ibun	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Ibun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	3.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Ibun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				

1.5. 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Ibum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	34.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Ibum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
1.5. 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Ibum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Laporan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Ibum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
1.5. 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Ibum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	307.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Ibum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
1,6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ibum	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	76%	Persen	202.750.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ibum	Persentase BMD dalam Kondisi Baik				
1.6. 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Ibum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	15.750.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Ibum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
1.6. 2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Ibum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	Unit		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Ibum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				
1.6. 3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Ibum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	187.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Ibum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				

1.6. 4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Ibum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Ibum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Ibum	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	87	Persen	90.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Ibum	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT				
2,1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ibum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	Persen	5.000.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ibum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
2.1. 1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ibum	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	10.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ibum	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
2,2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Ibum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	80	Persen	-	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Ibum	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				
2.2. 1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ibum	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	Laporan	-	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ibum	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				

2.2. 2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ibun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	Laporan	-	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ibun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
2,3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Ibun	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100	Persen	25.000.000,00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Ibun	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				
2.3. 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	Dokumen	25.000.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				
2,4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Ibun	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Ibun	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
2.4. 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Ibun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	Laporan	444.400.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Ibun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				

2,5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan	100	Persen		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan				
2.5. 1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				
2.5. 2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecam atan Ibun	Persentase Pelaksanaan Capaian Program dalam upaya Pemberdayaan Masyarkat Desa	5	Desa	283.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecam atan Ibun	Persentase Pelaksanaan Capaian Program dalam upaya Pemberdayaan Masyarkat Desa				
5,1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecam atan Ibun	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	80	Persen	90.000.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecam atan Ibun	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				

5.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Ibutan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Ibutan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				
5.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Ibutan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0	Dokumen		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Ibutan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				
5.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ibutan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	Dokumen	60.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Ibutan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
5.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ibutan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terbina	100	Persen		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ibutan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terbina				
5.2.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Ibutan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Ibutan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				
5.2.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Ibutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	1	Unit	13.000.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Ibutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				
5.2.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Ibutan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	40.000.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Ibutan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				
5.2.4	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Ibutan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Laporan	40.000.000,00	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Ibutan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				

	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Ibun	Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	80	Persen	25.000.000,00	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Ibun	Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	36	Keluarga	5.000.000,00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	36	Keluarga	5.000.000,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	36	Keluarga	5.000.000,00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	36	Keluarga	5.000.000,00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	36	Keluarga	5.000.000,00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				

6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecama tan Ibun	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	87	Persen	100.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecama tan Ibun	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum				
6,1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecama tan Ibun	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80	Persen	75.000.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecama tan Ibun	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
6.1. 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecama tan Ibun	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	50.000.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecama tan Ibun	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
6.1. 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecama tan Ibun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	25.000.000,00	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecama tan Ibun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				
6,2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecam atan Ibun	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	80	Persen		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecam atan Ibun					

6.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Ibun	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Laporan		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Ibun	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Ibun	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	87	Persen	108.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Ibun	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah				
7,1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Ibun	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	80	Persen	108.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Ibun	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				
7.1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Ibun	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120	Orang	60.000.000,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Ibun	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				
7.1.2	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Ibun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0	Kegiatan		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Ibun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				

7.1.3	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Ibun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	36	Orang	10.000.000,00	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Ibun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				
7.1.4	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	38.000.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Ibun	Persentase desa yang dibina dan diawasi	5	Desa	150.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Ibun	Persentase desa yang dibina dan diawasi				
8,1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Ibun	Persentase Desa yang dibina	80	Persen	150.000.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Ibun	Persentase Desa yang dibina				
8.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	Dokumen	15.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				
8.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	15.000.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				

8.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	15.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				
8.1.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	15.000.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				
8.1.6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	Dokumen	-	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				
8.1.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	Dokumen	55.000.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				
8.1.12	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1	Dokumen	10.000.000,00	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				
8.1.10	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1	Dokumen	7.500.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				
8.1.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Dokumen	7.500.000,00	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Ibun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				
8.1.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Ibun	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1	Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Ibun	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				

2.3 **Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) Desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Juli dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), yang akan di tindaklannuti dalam musrenbang tingkatan kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari desa/kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas-desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan. Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada perangkat daerah yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

Adapun usulan Musrenbang sebagai berikut:

Tabel 2.12 - T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kecamata Ibum Kabupaten Bandung

			NIHIL		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bandung. Dalam rangka memberikan kontribusi terhadap standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik pada penyelenggaran Pemerintahan, baik Pusat dan Daerah.

Peranan Kecamatan sangat strategis dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi sebagai berikut :

- 1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- 2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan,penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan;

Tabel 3.1
Dukungan Program Program perangkat daerah (Kecamatan) Yang mendukung terhadap prioritas pembangunan kabupaten, provinsi dan prioritas nasional

Program Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Program Kecamatan
PN3	SDM berkualitas dan berdaya saing	PP1	Reformasi sistem kesehatan daerah	P1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif	

Program Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung		Program Kecamatan
PN1	Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	PP2	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	P2	Pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan	
		PP8	Gerakan membangun desa			
PN7	Stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik	PP7	Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah	P3	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
		PP8	Gerakan membangun desa			
PN3	SDM berkualitas dan berdaya saing	PP5	Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan	P4	Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membentuk generasi berdaya saing global	
PN4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP9	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara			
PN6	Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	PP6	Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana	P5	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim	
		PP10	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup			
PN4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP3	Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan	P6	Peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur serta penguatan katahanan pangan	
PN2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	PP10	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup	P7	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah	
PN5	Infrastruktur untuk ekonomi pelayanan dasar	PP9	Pendidikan agama dan tempat ibadah juara			
PN3	SDM berkualitas dan berdaya saing	PP4	Reformasi sistem perlindungan social	P8	Peningkatan pelayanan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat	
PN2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	PP11	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	P9	Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran dan untuk mencapai mencapai visi dan misi pemerintahab daerah, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah, sehingga tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat arah yang jelas dan terukur serta memberikan parameter terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah.

a. Tujuan

Tujuan Kecamatan Ibun pada tahun 2025 dirumuskan dengan memperhatikan Misi 4, yaitu Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi yang diemban seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung, maka tingkat pencapaiannya dapat dilihat dari sisi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan itu sendiri. Adapun tujuannya, yaitu:

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
- 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Adapun Sasaran Renja Perubahan Kecamatan Ibun Tahun 2025 adalah:

- 1) Meninkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan publik;
- 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan;
- 3) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa.

Tabel 3.2
Tabel Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2025
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87

Tabel 3.3

Tabel Tujuan dan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rancangan Awal Renja 2025 Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Ket
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2. BMD dalam Kondisi Baik			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Pelaksanaan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan	

						dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			K
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		
			Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
N o	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			K
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam Kondisi Baik		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat IKM			
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Presentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan	

			Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			K
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Capaian Program dalam upaya Pemberdayaan Masyarkat Desa Persentase Pelaksanaan Capaian Program dalam upaya Pemberdayaan Masyarkat Desa			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	

4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum			
No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			K
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum		
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	
5	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah		
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kuliatas Tata Kelola Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang dibina dan diawasi		
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Des	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil. Program dan Kegiatan pada Kecamatan Ibun yang disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung, perencanaan program dan kegiatan ini sesuai alur atau mekanisme perencanaan mulai dari persiapan hingga penetapan skala prioritas. Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Ibun selama satu tahun ke depan tahun 2025, diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kabupaten Bandung.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, ditetapkan beberapa subkegiatan pada tahun 2025, dimana subkegiatan tersebut merupakan bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi pemerintah daerah, dalam Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ibun Tahun 2025 direalisasikan melalui program/kegiatan/subkegiatan. Adapun rencana program/kegiatan/sub kegiatan Kecamatan Ibun adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.4 T-C.33 sebagaimana terlampir di bawah:

Tabel 3.4. T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAP AIAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
						TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIK ATIF (Rp)		
						SEB ELU M	SES UDA H	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERU BAHA N 2025				NASI ONA L	DAE RAH					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	KECAMATAN IBUN								64242 70086	68162 45979	657695 3027	152682941						51178 53651		
7	UNSUR KEWILAYA HAN							64242 70086	68162 45979	657695 3027	152682941							51178 53651		
7.01	KECAMAT AN							64242 70086	68162 45979	657695 3027	152682941							51178 53651		
37073	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPAT EN/KOTA	Nilai AKIP					74,90 Poin	74,90 Poin	53038 70086	58037 12279	579418 7779	-629016435						46748 53651		
7.01.01.2 .01	Perencanaa n, Panganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaa n penganggar an dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan					80 Perse n	80 Perse n	65050 000	76634 000	755442 00	10494200			-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas	Aparat Keca matan Ibun		40550 000	KECAM ATAN IBUN

		<i>dan tepat waktu</i>												i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis				
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50000 00	37400 00	265020 0	-2349800	Kab. Bandung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis		10000 00	KECAM ATAN IBUN
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
		<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50000 00	33000 00	330000 0	-1700000	Kab. Bandung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina		10000 00	KECAM ATAN IBUN

															mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis					
7.01.01.2 .01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Doku men	1 Doku men	50000 00	33000 00	330000 0	-1700000	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis			10000 00	KECAM ATAN IBUN	
7.01.01.2 .01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna				1 Doku men	1 Doku men	50000 00	33000 00	330000 0	-1700000	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova			10000 00	KECAM ATAN IBUN	

		n Dokumen DPA-SKPD												tif dan dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis					
7.01.01.2 .01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Doku men	1 Doku men	50000 00	33000 00	330000 0	-1700000	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis			10000 00	KECAM ATAN IBUN
7.01.01.2 .01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Lapor an	1 Lapor an	36050 000	57164 000	571640 00	21114000	Kab. Band ung, Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis			33550 000	KECAM ATAN IBUN
7.01.01.2 .01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah																		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyeleng garaan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Doku men	1 Doku men	20000 00	12650 00	126500 0	-735000	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan			10000 00	KECAM ATAN IBUN

														dina mis				
7.01.01.2 .01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																	
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulka n dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	20000 00	12650 00	126500 0	-735000	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis		10000 00	KECAM ATAN IBUN
7.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaa n Administrai Keuangan yang Tepat Waktu				80 Perse n	80 Perse n	45582 70086	49002 45979	487738 3229	319113143			-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas i birok	Aparat Keca matan Ibun	42702 53651	KECAM ATAN IBUN

															ras integ ratif, inova tif dan dina mis					
7.01.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					21 Oran g/b ulan	21 Oran g/b ulan	45542 70086	48962 45979	487338 3229	319113143	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis			42662 53651	KECAM ATAN IBUN
7.01.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Lapor an	1 Lapor an	10000 00	10000 00	100000 0	0	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo			10000 00	KECAM ATAN IBUN

														rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis				
7.01.01.2 .02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulana n/Semester an SKPD				4 Lapor an	4 Lapor an	20000 00	20000 00	200000 0	0	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis		20000 00	KECAM ATAN IBUN
7.01.01.2 .02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Doku men	1 Doku men	10000 00	10000 00	100000 0	0	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan		10000 00	KECAM ATAN IBUN

														dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis				
7.01.01.2 .05	Administrasi Kepengawaa n Perangkat Daerah	<i>persentase dokumen pelaksanaa n administrasi kepegawaia n perangkat daerah yang tepat waktu</i>				80 Perse n	80 Perse n	13000 000	13000 000	129000 00	-100000			-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis	Aparat Keca matan Ibun	90000 00	KECAM ATAN IBUN
7.01.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkap an</i>				1 Paket	1 Paket	10000 000	10000 000	990000 0	-100000	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif		60000 00	KECAM ATAN IBUN

															dan dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis				
7.01.01.2 .05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				30 Oran g	30 Oran g	30000 00	30000 00	300000 0	0	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis			30000 00	KECAM ATAN IBUN
7.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor				80 Perse n	80 Perse n	10280 0000	26291 2100	258451 940	155651940			-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova	Aparat Keca matan Ibun		69500 000	KECAM ATAN IBUN

[illegible]

		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	41300 000	19588 3600	184665 400	143365400	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis			13000 000	KECAM ATAN IBUN
7.01.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20000 000	20000 000	295590 40	9559040	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan			50000 00	KECAM ATAN IBUN

														dina mis				
7.01.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50000 0	50000 0	500000	0	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis		50000 0	KECAM ATAN IBUN
7.01.01.2 .06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Lapor an	1 Lapor an	10000 00	10000 00	100000 0	0	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas		10000 00	KECAM ATAN IBUN

														i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis				
7.01.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	35000 000	40528 500	377275 00	2727500	Kab. Bandung, Kabupaten, Semarang Kab./D esa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		45000 000	KECAMATAN IBUN
7.01.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				80 Persen	80 Persen	55000 000	54620 000	531744 00	-1825600			-	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Refo	Aparat Kecamatan Ibun	10000 00	KECAMATAN IBUN

															rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis				
7.01.01.2 .07.0005	Pengadaan Mebel																		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	55000 000	54620 000	531744 00	-1825600	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis			10000 00	KECAM ATAN IBUN
7.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah				80 Perse n	80 Perse n	30700 0000	27324 8700	293682 510	-13317490			-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis	Aparat Keca matan Ibun		27000 0000	KECAM ATAN IBUN

															Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis					
7.01.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Lapor an	1 Lapor an	30000 00	30000 00	300000 0	0	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis			10000 00	KECAM ATAN IBUN	
7.01.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Lapor an	1 Lapor an	34000 000	34000 000	313338 10	-2666190	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif			34000 000	KECAM ATAN IBUN	

[illegible]

7.01.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
7	UNSUR KEWILAYAHAN							64242 70086	68162 45979	657695 3027	152682941						51178 53651	
7.01	KECAMATAN							64242 70086	68162 45979	657695 3027	152682941						51178 53651	
7.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik				88 Perse n	88 Perse n	20275 0000	22305 1500	223051 500	20301500			-	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Aparat Kecamatan Ibun	14550 000	KECAMATAN IBUN
7.01.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	15750 000	36051 500	360515 00	20301500	Kab. Bandung, Ibun, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi		25500 00	KECAMATAN IBUN

															ras integ ratif, inova tif dan dina mis				
7.01.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi				1 Unit	1 Unit	18700 0000	18700 0000	187000 000	0	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis			12000 000	KECAM ATAN IBUN
37438	PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DAN PELAYANA N PUBLIK	INDEKS KEPUASA N MASYARA KAT				87 Pers en	87 Pers en	47940 0000	48304 8000	342545 210	-464400000							15000 000	
7.01.02.2 .01	Koordinasi Penyeleng garaan Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	Presentase Koordinasi Penyeleng garaan Kegiatan Pemerintah an di				80 Perse n	80 Perse n	10000 000	58240 000	569132 10	46913210			-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova	Masya rakat Keca matan Ibun dan Peran gkat		0	KECAM ATAN IBUN

		Tingkat Kecamatan												tif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Desa Se Kecamatan Ibun			
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10000000	58240000	56913210	46913210	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		0	KECAMATAN IBUN
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Presentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana				80 persen	80 persen	25000000	14100000	11040000	-13960000			-	Reformasi birokrasi integratif,	Masyarakat Kecamatan Ibun dan Peran	15000000	KECAMATAN IBUN

		Pelayanan Umum													inova tif dan dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis	gkat Desa Se Keca matan Ibun			
7.01.02.2 .03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
		Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemelihara an Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Doku men	1 Doku men	25000 000	14100 000	110400 00	-13960000	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis			15000 000	KECAM ATAN IBUN

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan				80 persen	80 persen	44440000	410708000	274592000	-169808000			-	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Ibun dan Perangkat Desa Se Kecamatan Ibun		0	KECAMATAN IBUN
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	44440000	410708000	274592000	-169808000	Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan			0	KECAMATAN IBUN

															dina mis				
37803	PROGRAM PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DESA DAN KELURAH AN	Jumlah Desa Cepat Berkemban g				5 Desa	5 Desa	28300 0000	19884 8000	152649 000	-96000000							18700 0000	
7.01.03.2 .01	Koordinasi Kegiatan Pemberday aan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberday aan desa				80 Perse n	80 Perse n	90000 000	62819 000	547520 00	-35248000				-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis	Masya rakat Keca matan Ibun dan Peran gkat Desa Se Keca matan Ibun	67000 000	KECAM ATAN IBUN
7.01.03.2 .01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
		Jumlah Lembaga Kemasyara katan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawara				5 Lemb aga Kema syara katan	5 Lemb aga Kema syara katan	30000 000	17400 000	920400 0	-20796000	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)		-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova		30000 000	KECAM ATAN IBUN

		h Perencanaa n Pembangun an di Desa													tif dan dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis				
7.01.03.2 .01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
		Jumlah Laporan Peningkata n Efektivitas Kegiatan Pemberday aan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Lapor an	1 Lapor an	60000 000	45419 000	455480 00	-14452000	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis			37000 000	KECAM ATAN IBUN
7.01.03.2 .03	Pemberday aan Lembaga Kemasyara katan Tingkat Kecamatan	Presentase Pemberday aan Lembaga Kemasyara katan				80 Perse n	80 Perse n	16800 0000	11102 9000	728970 00	-95103000			-	Refo rmas i birok rasi integ ratif,	Masya rakat Keca matan Ibun dan Peran		80000 000	KECAM ATAN IBUN

		Tingkat Kecamatan													inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	ingkat Desa Se Kecamatan Ibun				
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	75000000	52029000	47689000	-27311000	Kab. Bandung, Ibun, Sempura Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis			25000000	KECAMATAN IBUN	
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan																			

		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	13000000	13000000	13000000	0	Kab. Bandung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		5000000	KECAMATAN IBUN
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
		Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	40000000	23000000	6104000	-33896000	Kab. Bandung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan		25000000	KECAMATAN IBUN

														dina mis				
7.01.03.2 .03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																	
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaa an Teknol ogi Tepat Guna</i>				1 Lapor an	1 Lapor an	40000 000	23000 000	610400 0	-33896000	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis		25000 000	KECAM ATAN IBUN
7.01.03.2 .06	Pemberday aan dan Kesejahtera an Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<i>Presentase Pemberday aan dan Kesejahtera an Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>				80 Perse n	80 Perse n	25000 000	25000 000	250000 00	0			-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas i birok	Masya rakat Keca matan Ibun dan Peran gkat Desa Se Keca matan Ibun	40000 000	KECAM ATAN IBUN

															ras integ ratif, inova tif dan dina mis				
7.01.03.2 .06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkata n Ketahanan Pangan Keluarga				36 Kelua rga	36 Kelua rga	50000 00	50000 00	500000 0	0	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis			50000 00	KECAM ATAN IBUN
7.01.03.2 .06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkata n Kesadaran Keluarga dalam Mewujudka n Rumah Sehat dan Layak Huni				36 Kelua rga	36 Kelua rga	50000 00	50000 00	500000 0	0	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo			10000 000	KECAM ATAN IBUN

		<i>serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah</i>													<i>rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis</i>				
7.01.03.2 .06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuha n Kesadaran Keluarga dalam Peningkata n Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapka n Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>				36 Kelua rga	36 Kelua rga	50000 00	50000 00	500000 0	0	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis			10000 000	KECAM ATAN IBUN
7.01.03.2 .06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
		<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>				36 Kelua rga	36 Kelua rga	50000 00	50000 00	500000 0	0	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan			10000 000	KECAM ATAN IBUN

[illegible]

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				80 Perse n	80 Perse n	75000 000	71082 000	710820 00	-3918000			-	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis	Masyarakat Kecamatan Ibun dan Perangkat Desa Se Kecamatan Ibun		59000 000	KECAMATAN IBUN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	50000 000	48317 000	483170 00	-1683000	Kab. Bandung, Ibun, Sema Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan			49000 000	KECAMATAN IBUN

														dina mis				
7.01.04.2 .01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	25000 000	22765 000	227650 00	-2235000	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis		10000 000	KECAM ATAN IBUN
7.01.04.2 .02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				80 Persen	80 Persen	25000 000	18750 000	124140 00	-12586000			-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas i birok	Masya rakat Keca matan Ibun dan Peran gkat Desa Se Keca matan Ibun	15000 000	KECAM ATAN IBUN

															ras integ ratif, inova tif dan dina mis				
7.01.04.2 .02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
		<i>Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>				1 Lapor an	1 Lapor an	25000 000	18750 000	124140 00	-12586000	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis			15000 000	KECAM ATAN IBUN
38534	PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN UMUM	INDEKS KEPUASA N MASYARA KAT				87 Pers en	87 Pers en	10800 0000	97850 000	968000 00	-21000000							87000 000	
7.01.05.2 .01	Penyeleng araan Urusan Pemerintah an Umum Sesuai Penugasan	<i>Persentase Pelaksanaa n Kegiatan Urusan Pemerintah an Umum Sesuai Penugasan</i>				80 Perse n	80 Perse n	10800 0000	97850 000	968000 00	-11200000			-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova	Masya rakat Keca matan Ibun dan Peran gkat		87000 000	KECAM ATAN IBUN

	Kepala Daerah	Kepala Daerah													tif dan dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis	Desa Se Keca matan Ibun				
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaa n dan Ketahanan Nasional				120 Oran g	120 Oran g	60000 000	55000 000	550000 00	-5000000	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis			39000 000	KECAM ATAN IBUN	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																			

		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				36 Orang	36 Orang	10000 000	82000 00	715000 0	-2850000	Kab. Bandung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis			10000 000	KECAMATAN IBUN
7.01.05.2 .01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	38000 000	34650 000	346500 00	-3350000	Kab. Bandung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan			38000 000	KECAMATAN IBUN

[illegible]

		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	15000000	14119900	5671900	-9328100	Kab. Bandung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis			2500000	KECAMATAN IBUN
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	15000000	14119900	5671900	-9328100	Kab. Bandung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformas i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis			2500000	KECAMATAN IBUN

															dina mis					
7.01.06.2 .01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																			
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaa n Keuangan Desa dan Pendayagu naan Aset Desa				1 Doku men	1 Doku men	15000 000	14119 900	567190 0	-9328100	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis			25000 00	KECAM ATAN IBUN	
7.01.06.2 .01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																			
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaa n Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Doku men	1 Doku men	15000 000	14120 000	108433 38	-4156662	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas			25000 00	KECAM ATAN IBUN	

														i birokrasi integratif, inovatif dan dinamis				
7.01.06.2 .01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																	
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Bandung, Kab. Soreng, Kab. Sukabumi, Kab. Tasikmalaya, Kab. Cirebon, Kab. Indragiri, Kab. Pangasinan, Kab. Pangkep, Kab. Selayar, Kab. Sumbawa, Kab. Tana Toraja, Kab. Tegal, Kab. Trenggeng, Kab. Wamena, Kab. Wajo, Kab. Widen,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		0	KECAMATAN IBUN
7.01.06.2 .01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																	
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	55000 000	55000 000	479400 00	-7060000	Kab. Bandung, Kab. Soreng, Kab. Sukabumi, Kab. Tasikmalaya, Kab. Cirebon, Kab. Indragiri, Kab. Pangasinan, Kab. Pangkep, Kab. Selayar, Kab. Sumbawa, Kab. Tana Toraja, Kab. Tegal, Kab. Trenggeng, Kab. Wamena, Kab. Wajo, Kab. Widen,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi birokrasi integratif, inovatif dan dinamis		60000 000	KECAMATAN IBUN

															mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis					
7.01.06.2 .01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																			
		Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangun an Kawasan Perdesaan				1 Doku men	1 Doku men	10000 000	10000 000	100000 00	0	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis			25000 00	KECAM ATAN IBUN	
7.01.06.2 .01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																			
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaa n Tugas, Fungsi, dan				1 Doku men	1 Doku men	75000 00	57500 00	575000 0	-1750000	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova			25000 00	KECAM ATAN IBUN	

[illegible]

		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	1 Laporan	10000 000	10000 000	100000 00	0	Kab. Band ung, Ibun, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis Refo rmas i birok rasi integ ratif, inova tif dan dina mis		25000 00	KECAM ATAN IBUN
J U M L A H								64242 70086	68162 45979	657695 3027	152682941						51178 53651	C

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini merupakan pengimplementasian konsep perencanaan. Pentingnya perencanaan dan peran yang dimainkannya di dalam keseluruhan proses manajerial organisasi, telah menempatkan perencanaan sebagai faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari organisasi Kecamatan Ibun. Perencanaan merupakan suatu proses yang terus menerus dengan melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi satu tahun kedepan.

Rencana Kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ibun Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung maupun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Ibun tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Ibun yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Ibun demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan, yang di dalamnya telah memuat Indikator kinerja dipergunakan sebagai tolok ukur pencapaiannya. Rencana Kerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025, sebagai berikut:

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E REN STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)
							SEBELUM	SEUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		KECAMATAN IBUN							6424270086	6816245979	6576953027	152682941
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							6424270086	6816245979	6576953027	152682941
	7.01	KECAMATAN							6424270086	6816245979	6576953027	152682941
1	37073	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP				74,90 Poin	74,90 Poin	5303870086	5803712279	5794187779	-629016435
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu				80 Persen	80 Persen	65050000	76634000	75544200	10494200
	7.01.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5000000	3740000	2650200	-2349800
	7.01.01.2.01.00.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5000000	3300000	33000000	-17000000
7.01.01.2.01.0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5000000	3300000	33000000	-17000000
7.01.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5000000	3300000	33000000	-17000000
7.01.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5000000	3300000	33000000	-17000000
7.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil				1 Laporan	1 Laporan	36050000	57164000	57164000	21114000

			<i>Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>									
	7.01.01. 2.01.00 08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyeleng garaan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>				1 Dok ume n	1 Dok ume n	2000 000	1265 000	12650 00	-735000
	7.01.01. 2.01.00 09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
			<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpul kan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>				1 Data	1 Data	2000 000	1265 000	12650 00	-735000
	7.01.01. 2.02	Administra si Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentas e Dokumen Pelaksana an Administra si Keuangan yang Tepat Waktu</i>				80 Pers en	80 Pers en	4558 2700 86	4900 2459 79	48773 83229	31911314 3
	7.01.01. 2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				21 Oran g/b ulan	21 Oran g/b ulan	4554 2700 86	4896 2459 79	48733 83229	31911314 3
	7.01.01. 2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan</i>				1 Lapo ran	1 Lapo ran	1000 000	1000 000	10000 00	0

			Akhir Tahun SKPD									
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2000000	2000000	2000000	0
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1000000	1000000	1000000	0
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu				80 Persen	80 Persen	13000000	13000000	12900000	-100000
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	10000000	10000000	9900000	-100000
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	3000000	3000000	3000000	0

			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	3500 0000	4052 8500	37727 500	2727500
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				80 Persen	80 Persen	5500 0000	5462 0000	53174 400	-1825600
7.01.01.2.07.00.05	Pengadaan Mebel											
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	5500 0000	5462 0000	53174 400	-1825600
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				80 Persen	80 Persen	3070 0000 0	2732 4870 0	29368 2510	-13317490
7.01.01.2.08.00.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1 Laporan	3000 000	3000 000	30000 00	0
7.01.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	3400 0000	3400 0000	31333 810	-2666190
7.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	0	2362 4870 0	25934 8700	25934870 0

	7	NON URUSAN							6424 2700 86	6816 2459 79	65769 53027	15268294 1
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							6424 2700 86	6816 2459 79	65769 53027	15268294 1
	7.01.01. 2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							6424 2700 86	6816 2459 79	65769 53027	15268294 1
	7.01	KECAMATAN							6424 2700 86	6816 2459 79	65769 53027	15268294 1
	7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik				88 Pers en	88 Pers en	2027 5000 0	2230 5150 0	22305 1500	20301500
	7.01.01. 2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	1575 0000	3605 1500	36051 500	20301500
	7.01.01. 2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1870 0000 0	1870 0000 0	18700 0000	0
1	37438	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT				87 Pers en	87 Pers en	4794 0000 0	4830 4800 0	34254 5210	- 46440000 0
	7.01.02. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di				80 Pers en	80 Pers en	1000 0000	5824 0000	56913 210	46913210

		Kecamatan	Tingkat Kecamatan									
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10000000	58240000	56913210	46913210
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				80 persen	80 persen	25000000	14100000	11040000	-13960000
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum										
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	25000000	14100000	11040000	-13960000
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan				80 persen	80 persen	444400000	410708000	274592000	-169808000
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	444400000	410708000	274592000	-169808000

			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1300 0000	1300 0000	13000 000	0
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	4000 0000	2300 0000	61040 00	-33896000
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna										
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	4000 0000	2300 0000	61040 00	-33896000
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				80 Persen	80 Persen	2500 0000	2500 0000	25000 000	0
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				36 Keluarga	36 Keluarga	5000 000	5000 000	50000 00	0
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah										
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang				36 Keluarga	36 Keluarga	5000 000	5000 000	50000 00	0

			<i>Kepemilikan Rumah</i>									
	7.01.03.2.06.00.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat										
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>				36 Keluarga	36 Keluarga	5000000	5000000	5000000	0
	7.01.03.2.06.00.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam										
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>				36 Keluarga	36 Keluarga	5000000	5000000	5000000	0
	7.01.03.2.06.00.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga										
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga</i>				36 Keluarga	36 Keluarga	5000000	5000000	5000000	0
3	38169	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT				87 Persen	87 Persen	10000000	89832000	83496000	-26000000
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan</i>				80 Persen	80 Persen	75000000	71082000	71082000	-3918000

			<i>Ketertiban Umum</i>									
	7.01.04.2.01.00.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	1 Laporan	5000 0000	4831 7000	48317 000	-1683000
	7.01.04.2.01.00.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat										
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>				1 Laporan	1 Laporan	2500 0000	2276 5000	22765 000	-2235000
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>				80 Persen	80 Persen	2500 0000	1875 0000	12414 000	-12586000
	7.01.04.2.02.00.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia										
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan</i>				1 Laporan	1 Laporan	2500 0000	1875 0000	12414 000	-12586000

			<i>dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>									
4	38534	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT				87 Persen	87 Persen	10800000	97850000	96800000	-21000000
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>				80 Persen	80 Persen	10800000	97850000	96800000	-11200000
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional										
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>				120 Orang	120 Orang	60000000	55000000	55000000	-50000000
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional										
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,</i>				36 Orang	36 Orang	10000000	8200000	7150000	-2850000

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	1500000	14119900	5671900	-9328100
7.01.06.2.01.0005		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa										
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	1500000	14120000	10843338	-4156662
7.01.06.2.01.0006		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa										
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0
7.01.06.2.01.0009		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa										
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5500000	5500000	47940000	-7060000
7.01.06.2.01.0010		Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan										
			Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1000000	1000000	10000000	0
7.01.06.2.01.0012		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan										
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi,				1 Dokumen	1 Dokumen	7500000	5750000	57500000	-1750000

			<i>dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</i>									
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa										
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	7500000	5726000	5726000	-1774000
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya										
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya</i>				1 Laporan	1 Laporan	10000000	10000000	10000000	0
	J U M L A H								6424270086	6816245979	6576953027	152682941

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, RKPD Tahun 2024 dan Rencana Strategis Kecamatan Ibun Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Ibun dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan/subkegiatan tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ibun Tahun 2025 dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan antara perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini sangat penting untuk menindaklanjuti pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Ibun.

Dengan komitmen dan sinergitas aparaturnya Kecamatan Ibun dan pelaksanaan evaluasi serta monitoring diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

CAMAT IBUN
AGUS RUSTANDI

BUPATI BANDUNG

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA